

JAGA DAN PERGUNAKANLAH KOLEKSI
INI DENGAN BAIK

SUATU SAAT ANAK DAN CUCU ANDA
SANGAT MEMBUTUKANNYA

Dari Kurikulum Berbasis Isi menjadi Kurikulum Berbasis
Kompetensi Serta Manajemen Bebas Sekolah: Tantangan Otonomi
Daerah Dibidang Pendidikan

MILIK PERPUSTAKAAN UNIV. NEGERI PADANG
DITERIMA TGL. : 25-9-2001
SUMBER/HARGA. Hd 1
KOLEKSI : 151
NO. INVENTARIS : 5161K/2001-d1(2)
KLASIFIKASI : 373.14 ANA - 00

Oleh
Dr. Azwar Ananda, MA

Disampaikan dalam Seminar Dosen Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Rangka Dies
Natalis Universitas Negeri Padang ke-47
Tanggal 14 September 2001

Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial-Universitas Negeri Padang
2001

MILIK PERPUSTAKAAN
UNIV. NEGERI PADANG

Dari Kurikulum Berbasis Isi menjadi Kurikulum Berbasis Kompetensi Serta Manajemen Bebas Sekolah: Tantangan Otonomi Daerah Dibidang Pendidikan

Dr. Azwar Ananda, MA

I. Pendahuluan

Dalam tulisan ini Penulis menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah dalam bidang pendidikan, kurikulum sekolah (Pendidikan formal) harus diubah dari kurikulum berbasis isi (Contents based curriculum) menjadi kurikulum berbasis kompetensi (Competencies based curriculum). Dengan demikian kurikulum nasional akan berisikan standar nasional atau ukuran baku yang akan menjadi acuan bagi daerah-daerah otonom dalam melaksanakan dan mengembangkan pendidikan di daerah masing-masing. Hal ini ditujukan agar aspirasi, lingkungan, nilai-nilai, adat-istiadat, visi dan misi daerah yang sifatnya spesifik dapat mewarnai kurikulum pendidikan sekolah di daerah dengan tetap berpedoman kepada standar nasional yang ada. Kemudian dalam tulisan ini Penulis juga akan menunjukkan bahwa kurikulum berbasis kompetensi sangat memungkinkan daerah otonom untuk mengembangkan pendidikan yang sesuai dengan karakteristik daerah tertentu, sehingga diversifikasi pendidikan secara nasional akan terwujud dengan tetap berpijak pada tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam UU No.2/1989. Tulisan ini juga akan menunjukkan bahwa pola manajemen berbasis sekolah (school based management) akan lebih sesuai dilaksanakan dalam otonomi pendidikan, karena pola ini memberi peluang kepada setiap komponen masyarakat dan sekolah untuk berpartisipasi dalam mengelola program pendidikan.

Kalau kita lihat secara saksama, kurikulum pendidikan formal mulai dari jenjang Pendidikan Dasar sampai ke jenjang Pendidikan Tinggi perlu terus menerus disempurnakan dalam rangka menciptakan kehidupan manusia Indonesia yang lebih cerdas, damai, terbuka, berdemokrasi, menerima perbedaan dan mampu bersaing dengan negara lain sehingga dapat mendukung diwujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Penyempurnaan

kurikulum juga harus dilakukan karena kebutuhan dan tuntutan masyarakat secara lokal, regional dan global selalu menginginkan standar yang lebih tinggi dalam bidang pendidikan. Oleh sebab itu kurikulum yang berbasis kompetensi merupakan kurikulum baru yang merupakan respon dari otoritas dalam bidang pendidikan secara nasional untuk mengadopsi perkembangan dan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara dalam segala bidang kehidupan dan memperhatikan kecenderungan-kecenderungan internasional yang selalu berkembang sangat cepat.

Yulaelawati (2001) menguraikan minimal ada tiga hal pokok yang mendesak diadakannya perubahan kurikulum pendidikan formal yang ada sekarang. **Pertama**, gerakan reformasi yang bertujuan untuk menegakkan demokrasi, menerapkan dan menghargai hak azazi manusia. Dua komponen ini secara praktikal mempengaruhi sebuah struktur pemerintahan dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. Salah satu konsekwensi dari gerakan reformasi ini adalah tuntutan untuk mereformasi struktur pendidikan yang akan diberlakukan termasuk tujuan dan kurikulum yang harus berorientasi pada pendidikan yang demokrasi dan mengajarkan demokrasi, hak azazi manusia, pluralisme sehingga bangsa Indonesia bisa hidup secara aman dan damai dalam alam tatanan bangsa landonesia yang secara alamiah adalah masyarakat majemuk. Kemajemukan bangsa hendakkah dilihat sebagai berkah dari Tuhan yang Mahaesa dan modal yang bisa digunakan dalam proses pembangunan bangsa.

Kedua, Gelombang globalisme yang menuntut Pemegang otoritas dibidang pendidikan untuk melakukan penyesuaian kebijaksanaan dalam bidang pendidikan. Abad ke-21 ditandai dengan abad informasi dan pasar bebas yang mengharuskan peserta didik untuk membekali diri dengan kemampuan-kemampuan yang bisa dipakai secara global seperti penguasaan tehnologi informatika, penguasaan bahasa asing dan mengerti prinsip-prinsip ekonomi secara mendasar.

Pada Abad ke-21 sumber kesejahteraan suatu bangsa tidak lagi berdasarkan atas sumber daya alam dan sosial yang dimiliki oleh bangsa itu semata, tetapi sudah bergeser kemodal intelektual, modal sosial dan kredibilitas sehingga tuntutan untuk memutakhirkan ilmu penegetahuan adalah suatu keharusan. Mutu lulusan tidak lagi cukup diukur dengan standar

lokal dan nasional saja, tetapi juga harus memenuhi standar global atau internasional. Dengan demikian keluaran pendidikan nasional Indonesia akan bisa bersaing dengan keluaran pendidikan negara lain dalam merebut pasar kerja secara internasional pula dan memelopori perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan temuan dan teori-teori baru.

Ketiga, Pelaksanaan otonomi daerah. Undang-undang No.22/1999 tentang otonomi daerah mengamanatkan bahwa sistem pemerintahan sudah harus berubah dari sistem sentralisasi ke sistem desentralisasi dimana Daerah Tingkat II (Kabupaten dan Kota) merupakan unit pelaksana utama dalam sistem pelayanan fungsi-fungsi kenegaraan. Kemudian dalam peraturan pemerintah No. 25/2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom. Peraturan pemerintah No.25/2000 ini menghendaki perlunya kebijaksanaan dibidang Pendidikan sebagai berikut.

1. Penetapan Standar Kompetensi siswa dan warga belajar.
2. Pengaturan kurikulum nasional
3. Penilaian hasil belajar secara nasional
4. Penyusunan pedoman pelaksanaan
5. Penetapan standar materi pelajaran pokok.
6. Penetapan kalender Pendidikan dan jumlah belajar efektif setiap tahun bagi pendidikan dasar, menengah dan luar sekolah.

Ketiga hal pokok tadi, memberi landasan yang kuat mengenai perlunya penyempurnaan kurikulum nasional yang berbasis isi menjadi kurikulum yang berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi memuat standar nasional dalam bidang pendidikan secara nasional, sehingga orang tua, guru, sekolah dan Pemerintah Daerah bisa mengetahui pencapaian tujuan belajar secara lokal di daerahnya. Kemudian juga bisa mengetahui pencapaian tujuan pendidikan secara regional dan nasional agar masing-masing daerah otonom bisa saling membandingkan pencapaian hasil belajar di daerah masing-masing dengan daerah lainya di Indonesia.

KALIP
30/11/2011

II. Pembahasan

A. Dari Kurikulum berbasis Isi ke Kurikulum Berbasis Kompetensi.

Kurikulum yang berlaku di sekolah-sekolah sekarang ini adalah Kurikulum 1994 dan ditambah dengan suplemennya pada tahun 1999. Kurikulum 1994 adalah kurikulum berbasis isi dimana kurikulum ini memuat mata pelajaran, pokok bahasan, buku sumber, pedoman guru, silabus dan materi ajar secara nasional. Guru disekolah membuat program pengajaran berpedoman kepada kurikulum ini, sehingga semua sekolah menurut jenis dan jenjang tertentu, memiliki kurikulum yang sama di seluruh Indonesia. Walaupun sudah ada muatan lokal dalam Kurikulum 1994 sebanyak 20 %, nampaknya belum efektif dalam mengakomodasikan keinginan dan karakteristik daerah tertentu didalam bidang pendidikan. Ditambah lagi sistem pelaksanaan pendidikan yang tersentralisasi secara nasional membuat muatan lokal hanya sebagai usaha memenuhi syarat sebuah kurikulum secara nasional.

Guna lebih mengefektikan pelaksanaan otonomi daerah dalam bidang pendidikan, maka kurikulum nasional sudah harus diubah dari sistem sentralisasi ke sistem desentralisasi. Bangun kurikulum yang sesuai dengan pola itu adalah kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum nasional berbasis kompetensi adalah suatu format yang menetapkan apa yang diharapkan dapat dicapai siswa/peserta didik dalam setiap tingkat pendidikan. Setiap kompetensi menggambarkan langkah kemajuan siswa menuju kompetensi yang lebih tinggi dalam pendidikan, moral, bahasa, matematika , sains, teknologi, ilmu sosial, kesenian dan pendidikan olah raga (Yulaelawati, 2001:5).

Selanjutnya kompetensi dapat dibedakan atas tiga hal pokok yaitu kompetensi lulusan, kompetensi standar dan kompetensi dasar. Kompetensi lulusan adalah kompetensi yang harus dicapai ketika siswa/peserta didik tamat dari satu jenjang pendidikan. Kompetensi standar adalah standar/bakuan kinerja yang harus dicapai ketika siswa menyelesaikan suatu mata pelajaran tertentu. Kompetensi dasar merupakan ukuran minimal/memadai yang ditetapkan tentang kemampuan, keterampilan, sikap dan perilaku dasar dalam menguasai materi ajar. Kompetensi dasar harus di kembangkan dan dilatihkan dan dialami siswa secara maju dan berkelanjutan seiring dengan perkembangannya untuk menjadi mahir berkinerja dalam memecahkan masalah (yulaelawati, 2001:5).

Ketiga kompetensi tersebut merupakan standar atau ukuran baku yang bisa dijadikan ukuran sebagai standar nasional dalam bidang pendidikan dalam era otonomi daerah yang berbasis pada kabupaten dan kota.

Jadi kurikulum yang berbasis kompetensi adalah kurikulum yang berisi pernyataan tentang apa yang sepantasnya dapat dilakukan siswa secara terus menerus (tetap) dalam suatu bagian kurikulum pada tingkat tertentu. Sedangkan kurikulum berbasis isi adalah kurikulum yang berbasis pada apa yang harus diajarkan untuk tujuan tertentu. Jadi kurikulum berbasis kompetensi dirancang berdasarkan bagaimana siswa belajar dan bagaimana harus melakukan sehingga kemampuan tertentu dapat dicapai. Sedangkan kurikulum berbasis isi dirancang berdasarkan apa yang harus diajarkan (materi) untuk mencapai tujuan belajar tertentu. Sebagai contoh dapat dikemukakan dalam mata pelajaran Kewarganegaraan (Kewargaan Negara adalah nama yang diusulkan sebagai ganti mata pelajaran PPKN dalam Kurikulum 2003). Dalam hal Demokrasi, kurikulum berbasis isi menetapkan teori apa yang diajarkan, materi apa yang harus diajarkan sehingga tujuan tercapai. Sedangkan kurikulum berbasis kompetensi menyatakan sebaik apa sepantasnya siswa berperilaku, bersikap dan dapat mengambil keputusan secara demokratis. Jadi kurikulum berbasis kompetensi mengacu kemampuan apa yang harus dicapai oleh siswa dalam proses belajar mengajar tertentu.

Jadi kurikulum berbasis kompetensi akan memuat kompetensi-kompetensi atau kemampuan-kemampuan yang diharapkan dalam setiap jenjang pendidikan, setiap mata pelajaran dan setiap materi pelajaran. Hal ini harus dikembangkan lebih lanjut oleh pemerintahan daerah otonom (Kabupaten dan Kota) dan sekolah menjadi silabus, materi, buku teks dan lain-lain.

B. Kurikulum Berbasis Kompetensi dan Otonomi Daerah.

Otonomi daerah dalam pengertian umum adalah diberikanya kekuasaan dan wewenang kepada daerah (Kabupaten dan Kota) untuk mengurus dan mengatur daerah sendiri agar lebih responsif terhadap tuntutan dan dinamika perkembangan masyarakat daerah (kabupaten dan Kota) dalam segala aspek kehidupan untuk membuat kebijaksanaan-

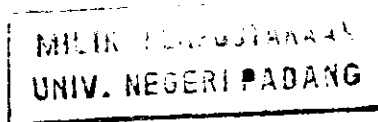
kebijaksanaan yang diperlukan. Dalam pelaksanaan otonomi tersebut dinyatakan bahwa daerah-daerah (Kabupaten dan Kota) diberikan kekuasaan dan wewenang untuk mengurus diri sendiri, yang salah satunya adalah kekuasaan dan wewenang untuk mengatur bidang pendidikan dan kebudayaan.

Otonomi daerah dibidang pendidikan adalah respon yang sangat pantas terhadap keluhan dan kritikan terhadap pelaksanaan pendidikan yang selama ini dianggap terlalu sentralistik pada tiga dekade terakhir. Pola kebijaksanaan sentralistik selama ini telah melahirkan kebijaksanaan dan pola pelaksanaan pendidikan yang seragam diseluruh Indonesia dalam bidang kurikulum, materi, metode bahkan sistem penilaian. Pola penyeragaman tersebut dirasakan kurang sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat Indonesia yang secara alamiah memiliki perbedaan-perbedaan dalam berbagai hal seperti kondisi alam lingkungan tempat tinggal, mata pencarian, etnik, nilai-nilai kehidupan, agama, sosial budaya dan cara hidup. Pola pendidikan yang sentralistik dan penyeragaman juga telah melahirkan berbagai distorsi pencapaian tujuan pendidikan dari kondisi sosial budaya dari daerah, karena pola pendidikan yang sentralistik tidak memungkinkan daerah-daerah dan/atau sekolah untuk lebih aspiratif terhadap perkembangan dan merespon tuntutan masyarakat. Kelemahan-kelemahan itulah yang direspon oleh otoritas pendidikan nasional dengan melahirkan kurikulum berbasis kompetensi dalam sistem pemerintahan otonomi menurut undang-undang No.22/1999 dan peraturan pemerintahan No.25/2000.

Jadi menurut kurikulum berbasis kompetensi daerah otonom (Kota dan Kabupaten) dapat mengembangkan pendidikan yang sesuai dengan kondisi daerah. Daerah dimana penduduknya bermata pencarian pertanian, nelayan, kehutanan, perkebunan dan industri akan mempunyai pola kebijaksanaan pendidikan yang berbeda satu sama lain. Akhirnya peserta didik dididik menurut pola yang jelas, sehingga kritikan terhadap pendidikan yang menjauhkan anak didik dari lingkungannya tidak akan terjadi lagi.

Untuk menjawab tantangan dan permasalahan pendidikan yang yang berpola sentralistik dan penyeragaman adalah melalui otonomi pendidikan di daerah (Kota dan Kabupaten). Untuk itu kurikulum nasional harus berubah pola dari kurikulum berbasis isi ke kurikulum

5/6/K/2001-d, (2)



berbasis kompetensi (From contents based curriculum to competencies based curriculum). Maka pemerintah pusat (dalam hal ini adalah Departemen Pendidikan Nasional) hanya menetapkan kompetensi dasar, kompetensi lulusan dan kompetensi standar secara nasional. Sedangkan pengembangan ketiga kompetensi tersebut menjadi silabus, materi ajar, buku sumber (guru dan siswa) untuk setiap mata pelajaran adalah wewenang dan tugas pemerintahan Kota dan Kabupaten. Daerah dapat memasukkan materi ajar sesuai dengan pola umum pengembangan daerah masing-masing dan sudah jelas pelaksanaan pendidikan tidak lagi seragam akan tetapi tetap memakai kontrol kendali mutu melalui kurikulum nasional yang memuat standar atau ukuran baku yang harus diikuti.

Desentralisasi Pendidikan adalah jalan terbaik yang bisa ditempuh untuk bisa mengakomodasi perkembangan dan dinamika yang ada guna meningkatkan mutu pendidikan. Brady (1992:4) mengatakan :

Dicentralisation is seen to be an appropriate response to the need for schools to help students cope with change and increase leisure time, to develop high levels of talent and competence, and to meet employment requirements in a society which is increasingly based on pluralism and individuality. While it may be difficult to control modern education system centrally.

Brady menekankan bahwa desentralisasi pendidikan adalah pola yang tepat untuk membantu sekolah dalam mengembangkan program pendidikan yang bisa membantu peserta didik guna menghadapi berbagai perubahan dalam masyarakat, mengembangkan kemampuan dan kompetensi siswa dalam usaha memenuhi syarat yang makin tinggi dalam dunia kerja. Jadi desentralisasi pendidikan ini dipandang oleh Brady sebagai kebijaksanaan strategis bagi dunia pendidikan yang bisa secara cepat merespon perkembangan masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan, dunia kerja dan pola kehidupan yang berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kemudian kalau dilihat bagaimana sebaiknya sebuah kurikulum itu harus dibangun, maka Posner (1998) menjelaskan minimal ada empat pertanyaan yang harus diajukan dan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu akan mencerminkan baik atau tidaknya sebuah kurikulum. Pertanyaan pertama adalah "What educational purposes the school should seek to attain". Ini mencerminkan tujuan dari pendidikan yang akan dibangun. Pertanyaan kedua

“What educational experiences can be provided that are most likely to attain these purposes”. Ini mencerminkan metode pengajaran yang dikehendaki. Ketiga “the planner must find ways that these educational experiences can be organized effectively dan pertanyaan keempat adalah “the planner must determine whether the educational purpose are being attained (Posner, 1998:80-81). Jadi pendidikan yang efektif hendaknya dikembangkan di daerah dengan memperhatikan potensi, visi dan misi daerah masing-masing. Dengan demikian akan lahir pola pendidikan yang berakar pada budaya sendiri di daerah otonom dengan standar nasional dan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan lokal, nasional dan global dalam tenaga kerja serta kebutuhan tenaga lainnya.

Kurikulum berbasis kompetensi memiliki dua keuntungan utama dalam kerangka otonomi daerah karena kurikulum berbasis kompetensi ini memiliki sifat **esensial dan lentur** (Yulaelawati, 2001:6). Dari segi sifat esensial atau bersifat umum, kurikulum berbasis kompetensi memberikan ruang kepada sekolah bersama-sama dengan pemerintahan kota dan/atau kabupaten untuk mengembangkan kurikulum lebih lanjut sesuai dengan kebijaksanaan daerah tanpa mengabaikan kebijaksanaan nasional. Yulaelawati (2001) menggamabarkan ada enam kompetensi yang bersifat umum yang harus ada pada setiap sekolah.

1. Kompetensi dalam pengetahuan dan kemampuan bahasa, matematika, sains dan ilmu sosial;
2. Kompetensi dalam teknologi dan perancangan, seni, kreasi dan konstruksi (bangunan);
3. Kompetensi dalam memecahkan masalah dan bekerja secara mandiri;
4. Kompetensi dalam kesadaran budaya dan tingkah laku moral yang baik;
5. Kompetensi dalam bekerja sama dan pembangunan etika kerja;
6. Kompetensi dalam kesehatan Jasmani (olah raga)

Demikianlah kurikulum berbasis kompetensi dikatakan bersifat esensial.

Kemudian kurikulum berbasis kompetensi juga dikatakan bersifat lentur. Dalam hal ini kurikulum berbasis kompetensi memberikan kesempatan kepada daerah untuk menyesuaikan materi ajar/pokok bahasan, buku ajar, buku teks sesuai dengan potensi dan arah

perkembangan daerah tertentu sehingga pendidikan sekolah sangat akomodatif terhadap lingkungan dan aspirasi daerah. Sekolah bersama pemerintahan Kota atau Kabupaten akan memiliki peluang yang sangat besar untuk mengisi kurikulum sesuai dengan visi dan misi daerah tertentu baik secara umum maupun secara khusus sehingga akan lahir anak didik yang berbasis pada budaya lokal dengan standar nasional.

Kurikulum berbasis kompetensi memuat visi dan wawasan masa depan. Visi dan wawasan masa depan perlu berpijak kepada wawasan nasional dan juga visi internasional (Pusat Kurikulum, 2001). Dalam wawasan nasional kurikulum mengandung azas keanekaragaman dan azas pemersatu. Azas keanekaragaman ditandai dengan kurikulum yang berdiversifikasi yang mempertimbangkan potensi, aspirasi dan kebutuhan daerah. Sedangkan azas pemersatu dalam kurikulum ini tercermin dengan adanya standar nasional baik yang mengacu kepada kemampuan akademik maupun mengacu kepada keterampilan hidup yang harus dimiliki oleh peserta didik. Kemudian kurikulum ini juga harus memuat visi internasional dalam arti kita harus melihat kemajuan-kemajuan negara lain (minimal ASEAN) agar kita bisa mengembangkan keunggulan dan daya saing dari sumber daya manusia yang akan dihasilkan.

Maka nanti masing-masing daerah di Indonesia akan memiliki pola pendidikan yang beragam dengan standar yang sama baiknya. Daerah Propinsi Riau, sebagai contoh mungkin akan mengembangkan pola pendidikan yang menekankan pada hal-hal yang berhubungan dengan aspek pertambangan minyak bumi. Propinsi di Kalimantan akan mengembangkan pendidikan dengan penekanan pada pertambangan Batubara. Propinsi Jawa Barat, DKI Jakarta dan Jawa Timur memusatkan pada dunia Industri berat dan ringan dan Sumatera Barat mungkin akan memusatkan orientasi pendidikannya pada dunia industri jasa, agribisnis, pariwisata dan lain-lain sebagainya. Akhirnya akan terjadi nilai lebih/pusat keunggulan dari pola pendidikan yang dikembangkan oleh berbagai daerah otonom. Maka nanti suatu ketika anak didik di Indonesia akan memiliki pilihan yang banyak sekali terhadap pendidikan yang diinginkan sesuai dengan bakat dan talenta yang dimilikinya.

Seorang peserta didik yang ingin mendalami pertambangan minyak bumi, maka ia akan datang ke kota Pekanbaru, belajar Batubara ke Kalimantan, belajar perkapalan ke Surabaya dan belajar industri jasa ke Padang. Demikianlah otonomi pendidikan dengan kurikulum berbasis kompetensi akan melahirkan diversifikasi pendidikan sesuai dengan potensi dan keadaan otonomi daerah yang ada.

Demikian juga kiranya didalam satu propinsi. Daerah otonom (Kabupaten dan Kota) juga akan memiliki program pendidikan yang spesifik tanpa melupakan kompetensi standar secara nasional. Di Propinsi Sumatra Barat, sebagai contoh, masing-masing daerah otonom bisa mengembangkan program pendidikan sesuai dengan potensi daerah. Kota Padang, mungkin akan mengembangkan pendidikan yang berorientasi pada perikanan laut, perdagangan, industri dan jasa. Sementara Kabupaten Tanah Datar, mungkin akan mengembangkan program pendidikan yang berorientasi pada pertanian dan agribisnis. Anak didik di Tanah Datar tidak perlu mendalami perikanan laut, karena di Tanah Datar tidak ada laut dan demikian pula sebaliknya, anak didik kota Padang tidak perlu mendalami bagaimana bertanam pisang, karena kota Padang tidak punya tanah pertanian yang cukup untuk itu. Demikianlah diversifikasi pendidikan yang mungkin dikembangkan melalui kurikulum berbasis kompetensi.

Akan tetapi untuk mewujudkan kurikulum berbasis kompetensi, yang menurut rencana akan diberlakukan mulai tahun ajaran 2003, mempunyai tantangan-tantangan yang tidak kecil. Sekolah bersama dengan pemerintahan daerah dituntut menjabarkan standar nasional menjadi silabus, materi ajar, buku ajar dan buku teks untuk setiap mata pelajaran. Ini adalah pekerjaan yang sangat berat bagi sekolah dan pemerintahan kota atau kabupaten. Oleh sebab itu mulai dari sekarang sekolah dan pemerintahan daerah sudah harus mengambil langkah-langkah untuk menyambut hal ini secara serius dan sungguh-sungguh. Untuk itu sekolah dan pemerintahan kota atau kabupaten hendaknya bisa menjalin kerjasama dengan Perguruan Tinggi yang ada di daerah masing-masing, karena Perguruan Tinggi dianggap memiliki sumber daya manusia yang bisa membantu memecahkan masalah ini dengan baik.

C. Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah dan Otonomi Daerah

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, manajemen pendidikan hendaknya dibuat secara lokal (*local management of school*). Levacic (1990) mendefinisikan manajemen lokal adalah manajemen sebuah sekolah dimana sekolah itu diberi kekuasaan dan wewenang untuk membuat keputusan untuk menjalankan pendidikan termasuk didalamnya kurikulum, tujuan pendidikan, anggaran, strategi mengajar dan akuntabilitas. Di Inggris, sebagai contoh, kebijaksanaan pendidikan di sekolah dibuat oleh guru, kepala sekolah, *governing body*, dimana dalam *governing body* adalah perwakilan orang tua, wakil masyarakat dan komponen lain yang ada dalam masyarakat. Hal yang sama juga dipraktekan di Selandia Baru dimana badan yang bernama *The Board of Trustees* yang anggotanya terdiri dari orang tua, guru, wakil masyarakat berwenang membuat kebijaksanaan pendidikan di sekolah yang dituangkan kedalam sebuah dokumen yang disebut *The School Charter* (MacPherson, 1993). Maka di Selandia Baru, kurikulum sekolah, tujuan sekolah, anggaran dan akuntabilitas semuanya didasarkan pada apa yang tertuang dalam *school charter* tersebut.

Jadi *school based management* adalah pola pembuatan kebijaksanaan pendidikan secara lokal dan tentu tetap berpedoman kepada standar nasional yang telah ada. Dengan demikian masyarakat lokal, orang tua dan guru betul-betul diberi kesempatan untuk berpartisipasi merencanakan, menjalankan dan mengevaluasi program pendidikan secara lokal. Kemudian sekolah harus akuntabel kepada orang tua dan masyarakat sekitar, sehingga kualitas pendidikan bisa dikontrol secara jelas. Orang tua dan masyarakat yang tergabung dalam *governing body* (Inggris) atau *the Board of Trustees* (Selandia baru) menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan aturan yang ada. Sebagai contoh, orang tua dan masyarakat dapat mengontrol keuangan sekolah, mengganti kepala sekolah, menghukum guru, mengangkat guru dan sebagainya. Dengan demikian akan lahir pendidikan yang berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dalam segala lapangan kehidupan.

III. Kesimpulan

Kurikulum berbasis kompetensi adalah kurikulum yang berisikan seperangkat kemampuan siswa yang harus dicapai pada setiap jenjang pendidikan, mata pelajaran dan pokok bahasan di sekolah. Kompetensi tersebut diwujudkan pada kurikulum nasional yang berisikan standar nasional untuk menjadi acuan bagi pemerintah daerah otonom yaitu Kabupaten dan Kota. Kurikulum berbasis kompetensi sangat memungkinkan lahirnya diversifikasi pendidikan karena masing-masing daerah otonom dapat memasukkan spirasi, potensi, misi, visi daerah kedalam kurikulum sekolah tanpa melupakan dan tetap mepedomani standar nasional sebagai acuan. Hal ini akan lebih mungkin jika diterapkan manajemen berbasis sekolah (school based management or local management of school) karena pola ini memberi kesempatan setiap unsur masyarakat dan sekolah untuk berpartisipasi dalam merumuskan program pendidikan.

MILIK PERPUSTAKAAN
UNIV. NEGERI PADANG

Daftar Pustaka

- Brady, L. (1992) *Curriculum Development*, Sydney: Prentice Hall
- Levacic, R. (1992) Local Management of School: Aim, Scope and Impact, *Educational Management and Administration*, Vol. 20(2) pp.16-29
- MacPherson, R.J.S. (1993) "Challenging 'Provider-Capture' With Radical Change to Educational Administration in New Zealand in Yvonne Martin & R.J.S. MacPherson (eds) *Restructuring Administrative Policy in Public Schools: Canadian and International Case Study*, Calgary: Detselig Enterprise Ltd
- Pusat Kurikulum Diknas (2001) *Perintisan (Piloting) Kurikulum Dalam Otonomi Daerah*, Lokakarya Penyusunan Kurikulum Berbasis Kompetensi, Hotel Indo Alam, Cipanas, 28-30 Mei 2001
- Posner, George, J. (1998) "Models of Curriculum Planning" in London E. Beyer & Michael W. Apple (Eds) *The Curriculum: Problems, Politics and Possibilities*, New York: State University of New York Press.
- Undang-undang No. 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-undang No. 22/1999 tentang Otonomi Daerah
- Peraturan Pemerintah No. 25 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai daerah Otonom
- Yulaelawati, E. (2001) *Kurikulum Berbasis Kompetensi dan Standar Nasional*, Lokakarya Penyusunan Kurikulum Berbasis Kompetensi, Hotel Indo Alam, Cipanas, 28-30 Mei 2001